

Dampak Regulasi POJK 51/2017 Terhadap Kualitas Pengungkapan GRI Pada Emiten Sektor Konstruksi

Ucok Jimmy*, Agus Munandar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Jalan Arjuna Utara, Nomor 9, Kebon Jeruk, 11510, Jakarta, Indonesia

Email: ¹*lesson77wan@gmail.com, ²agus.munandar@esaunggul.ac.id

Email Penulis Korespondensi: lesson77wan@gmail.com

Submitted: 20/01/2026; Accepted: 30/01/2026; Published: 01/02/2026

Abstrak—Penelitian ini menganalisis dampak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan terhadap kesesuaian pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Standar *GRI 2021*. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif terhadap laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari sampel perusahaan BUMN dan swasta sektor konstruksi selama periode 2015–2023 dengan teknik *purposive sampling*. Indikator analisis mengacu pada kerangka utama *GRI 2021* yang meliputi dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 51/2017 berperan sebagai katalis signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan, dengan tren peningkatan pengungkapan indikator *GRI* yang terlihat jelas pasca tahun 2017. Namun, ditemukan disparitas yang nyata dalam kedalaman dan konsistensi pengungkapan antara BUMN konstruksi dan perusahaan swasta konstruksi. BUMN konstruksi menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dan adaptasi yang lebih cepat dengan skor rata-rata pengungkapan 58,9 poin atau 46%, didorong oleh mandat kelembagaan dan pengawasan regulatif yang kuat dari BP Danantara, BP BUMN, dan OJK. Sebaliknya, perusahaan swasta konstruksi cenderung lebih lambat beradaptasi dengan skor rata-rata pengungkapan 30,6 poin atau 24% dan pelaporannya masih terfokus pada aspek kepatuhan, memerlukan insentif pasar dan tekanan investor yang lebih kuat untuk mencapai keselarasan penuh dengan standar global. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris kritis dengan menguji efektivitas POJK 51/2017 dalam mendorong keselarasan laporan keberlanjutan emiten konstruksi dengan *GRI Standards 2021*. Temuan penelitian ini mengonfirmasi efektivitas POJK 51/2017 yang mengarahkan pelaporan ke standar *GRI 2021*. Namun, diperlukan penguatan kapasitas internal, harmonisasi kebijakan, dan integrasi indikator lingkungan, sosial dan tata kelola yang lebih komprehensif untuk mencapai pelaporan keberlanjutan yang holistik di sektor konstruksi Indonesia.

Kata Kunci: POJK 51/2017; GRI Standards 2021; Laporan Keberlanjutan; Analisa Konten; ESG

Abstract—This study analyzes the impact of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51/2017 concerning Sustainable Finance on the conformity of sustainability report disclosures of construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the 2021 GRI Standards. The research method uses a quantitative method on annual reports and sustainability reports from a sample of state-owned and private construction companies during the 2015–2023 period using a purposive sampling technique. Analysis indicators refer to the main framework of the GRI 2021 which includes economic, environmental, and social dimensions. The results show that POJK 51/2017 plays a significant role as a catalyst in increasing transparency and accountability in sustainability reporting, with a clear trend of increasing GRI indicator disclosures after 2017. However, a clear disparity was found in the depth and consistency of disclosures between state-owned construction companies and private construction companies. State-owned construction companies demonstrated higher levels of compliance and faster adaptation, with an average disclosure score of 58.9 points (46%), driven by strong institutional mandates and regulatory oversight from BP Danantara, BP BUMN, and the Financial Services Authority (OJK). Private construction companies, on the other hand, tended to adapt more slowly, with an average disclosure score of 30.6 points (24%), and their reporting remained primarily compliance-focused, requiring stronger market incentives and investor pressure to achieve full alignment with global standards. The findings of this study confirm the effectiveness of POJK 51/2017, which directs reporting to the 2021 GRI standards. However, internal capacity building, policy harmonization, and a more comprehensive integration of environmental, social, and governance indicators are needed to achieve holistic sustainability reporting in the Indonesian construction sector.

Keywords: POJK 51/2017; GRI Standards 2021; Sustainability Reporting; Content Analysis; ESG

1. PENDAHULUAN

Keberlanjutan menjadi fokus utama perusahaan dalam tata kelola, menuntut perusahaan dalam menyeimbangkan laba serta tanggung jawab perusahaan sosial dan lingkungan. Pelaporan keberlanjutan digunakan perusahaan dalam menyampaikan kinerja non keuangan kepada pemangku kepentingan. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 memberikan pengaruh signifikan bagi perusahaan dalam menerbitkan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Regulasi ini mendorong integrasi *Environment, Social, and Governance (ESG)* ke dalam strategi bisnis, serta menekankan pentingnya transparansi dalam menyampaikan informasi ke publik.

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang relevan untuk dianalisis dalam perkembangan pelaporan keberlanjutan, yang memiliki kegiatan usaha berdampak langsung terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perusahaan konstruksi diharapkan mampu mengadopsi praktik pelaporan keberlanjutan yang komprehensif dan bertanggung jawab. Penerapan pelaporan keberlanjutan telah dilakukan oleh perusahaan di Indonesia terutama yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai POJK 51/2017, namun tingkat kualitas dan kesesuaian pelaporan terhadap standar internasional masih bervariasi.

Global Reporting Initiative (GRI) telah menjadi standar acuan utama dalam penyusunan laporan keberlanjutan (GRI, 2022). Pembaruan *GRI Standard 2021* menekankan pendekatan berbasis materialitas yang lebih spesifik, memperkuat transparansi, serta menyelaraskan pelaporan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable*

Development Goals/SDGs) dan prinsip *stakeholder inclusiveness*. *GRI Standard 2021* memberikan panduan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan yang tidak hanya menilai kelengkapan informasi, tetapi juga kesesuaian isi laporan dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan dampak material perusahaan terhadap keberlanjutan.

Legitimasi organisasi adalah hasil dari proses legitimasi internal dan pengaruh eksternal dari kelompok lain yang menyelaraskan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku (Dowling et al., 1975). Menurut Suchman et al. (1995) legitimasi adalah persepsi mengenai tindakan entitas yang dianggap diharapkan, tepat, atau sesuai oleh masyarakat dalam sistem nilai dan norma yang berlaku. Pengungkapan ESG adalah strategi perusahaan untuk mendapatkan legitimasi sosial sesuai teori legitimasi. Integrasi ESG adalah kunci untuk menentukan nilai dan keberlanjutan perusahaan di masa depan (Edmans, 2023).

POJK 51/2017 mendorong pelaporan keberlanjutan yang tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif, mengubah legitimasi perusahaan konstruksi dari sekadar formalitas menjadi aksi nyata penciptaan nilai jangka panjang dengan standar global seperti GRI, namun untuk mencapai efektivitas penuh, perlu penekanan pada implementasi substansi bukan hanya kuantitas dalam mempertahankan legitimasi terhadap pemangku kepentingan.

Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa keberlangsungan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan pemegang saham, tetapi juga oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan (Freeman et al., 1984). Pelaporan keberlanjutan berkembang dari alat pemetaan harapan pemangku kepentingan di awal, menjadi mekanisme dialog dan akuntabilitas partisipatif di tahap matang, melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan mendorong transparansi multi arah (Fuadah et al., 2018).

Kerangka audit ESG yang diusulkan berlandaskan teori pemangku kepentingan, menjadikan kredibilitas laporan keberlanjutan bergantung pada pemenuhan ekspektasi berbagai pihak, untuk memastikan indikator ESG mencerminkan prioritas komunitas dan tidak hanya investor, sehingga laporan menjadi alat akuntabilitas berbagai pihak, memperkuat legitimasi sosial, dan menciptakan nilai berkelanjutan (Ilori et al., 2023).

GRI Standards menekankan bahwa kesesuaian pengungkapan menunjukkan sejauh mana perusahaan memahami dan menanggapi ekspektasi pemangku kepentingan dengan mengidentifikasi isu-isu yang relevan melalui *stakeholder inclusiveness* dan *materiality assessment*, sehingga menghasilkan pelaporan yang terstruktur, transparan, dan relevan.

Menurut Dimaggio et al. (1983) konsep *ESG* dapat dikaitkan dengan teori institusional melalui tiga mekanisme isomorfisme, yaitu isomorfisme koersif terlihat ketika regulasi pemerintah dan tekanan pemangku kepentingan memaksa perusahaan untuk mengadopsi praktik *ESG* guna memperoleh legitimasi dan menghindari sanksi. Isomorfisme mimetik terjadi ketika perusahaan meniru model *ESG* dari organisasi yang dianggap sukses, terutama dalam kondisi ketidakpastian terkait dampak lingkungan dan sosial. Isomorfisme normatif muncul melalui profesionalisme dan jaringan industri yang menyebarkan standar *ESG* sebagai norma yang diterima luas. Teori institusional menjelaskan homogenisasi praktik *ESG* bukan semata-mata karena efisiensi, tetapi sebagai respons terhadap tekanan legitimasi, ketidakpastian, dan norma profesional di organisasi. Homogenisasi praktik *ESG* didorong oleh legitimasi institusional, bukan hanya efisiensi ekonomi, karena membentuk perilaku organisasi agar sesuai norma (Chen et al., 2023).

Definisi dari pemangku kepentingan dapat berupa individu dan kelompok orang memengaruhi kinerja atau dipengaruhi oleh perusahaan menurut Freeman et al. (1984), adalah pemerintah, masyarakat, konsumen, LSM, pihak lain, serta investor memiliki kepentingan atas aktivitas perusahaan. Tekanan dari pemangku kepentingan sering mendorong perusahaan transparan, akuntabel, dan memiliki tanggung jawab secara sosial maupun lingkungan. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa apabila kita mengadopsi hubungan antara suatu bisnis dan entitas baik pelanggan, pemasok, karyawan, investor, masyarakat, dan manajer perusahaan maka dapat menciptakan dan memperdagangkan nilai.

ESG sangat penting karena krusial untuk nilai jangka panjang perusahaan, sehingga setiap akademisi atau praktisi harus menganggapnya serius, bukan hanya mereka yang berfokus pada penelitian atau jabatan *ESG* (Edmans, 2023). Pengungkapan *ESG* berdampak positif pada kinerja keuangan, terutama di perusahaan dengan investor *ESG*, usia lebih panjang, perhatian media tinggi, dan biaya agensi tinggi. Legitimasi institusional juga membentuk perilaku organisasi terkait *ESG*. Secara global, kinerja *ESG* perusahaan berkembang menjadi metrik untuk mengevaluasi komitmen mereka terhadap perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial (Chen et al., 2023).

Laporan berkelanjutan mencerminkan sejauh mana perusahaan melaporkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara terintegrasi dan komprehensif. Keterbandingan dalam pelaporan keberlanjutan berarti organisasi harus melaporkan informasi dengan cara sama sepanjang waktu, sehingga mudah dipahami perubahan kinerja dan dibandingkan dengan organisasi lain. Dukungan perusahaan diperoleh melalui pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan, karena para pemangku kepentingan berharap manajemen melaporkan semua kegiatan bisnis yang dilakukan (Martha, 2023). Laporan yang berkualitas meningkatkan reputasi bagi perusahaan serta hal positif bagi investor serta pemangku kepentingan lainnya. Laporan keberlanjutan dikembangkan untuk memberikan informasi mengenai perusahaan memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan baik bagi perusahaan dan negara (Seroka-Stolka et al., 2020).

Meskipun POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan, dalam praktiknya masih ditemukan adanya aspek-aspek yang belum diungkapkan secara memadai serta variasi kualitas pengungkapan antarperusahaan (Mutia, 2025; Mutiha, 2022). Banyak perusahaan hanya fokus pada kewajiban regulasi, mengabaikan standar internasional seperti GRI 2021, sehingga kualitas laporan keberlanjutan belum optimal; padahal, laporan ini penting untuk transparansi kinerja sosial, lingkungan, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Adeng Pustikaningsih et al., 2024).

Meskipun penelitian mengenai *GRI* dan pelaporan keberlanjutan telah berkembang pesat serta memiliki kerangka konseptual yang mapan E-Vahdati & Aripin (2023), masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji kesenjangan antara kewajiban regulatif POJK No. 51/2017 dan tingkat kesesuaian pengungkapan dengan *GRI Standards 2021* di Indonesia. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada keberadaan laporan keberlanjutan, belum mendalami kualitas dan kedalaman pengungkapan yang mencerminkan kepatuhan substantif terhadap standar internasional. Penelitian ini mengevaluasi dampak POJK 51/2017 terhadap kesesuaian pengungkapan keberlanjutan dengan *GRI Standards 2021* di sektor konstruksi Indonesia untuk memberikan gambaran empiris kontribusi regulasi nasional terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan yang terukur secara internasional. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, otoritas pasar modal, dan perusahaan konstruksi BUMN dan swasta, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keberlanjutan di masa depan.

Penelitian ini menganalisis kesesuaian pengungkapan keberlanjutan perusahaan konstruksi dengan *GRI Standards 2021* sebelum dan sesudah penerapan POJK 51/2017, mengevaluasi perubahan kualitas pengungkapan pada dimensi tata kelola, lingkungan, dan sosial, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi variasi kesesuaian antar perusahaan konstruksi BUMN dan swasta periode 2015-2023.

Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai mekanisme isomorfisme koersif dan teori legitimasi dalam konteks regulasi pasar berkembang. Analisis terhadap kualitas kesesuaian ini menghasilkan identifikasi pemetaan celah yang spesifik, menawarkan kerangka evaluatif yang dapat direplikasi serta bukti berbasis data bagi perbaikan kebijakan dan meningkatkan substansi serta akuntabilitas laporan keberlanjutan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa regulasi dan tekanan institusional memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan. *GRI* digunakan sebagai kerangka kerja dalam penelitian untuk mengevaluasi tingkat pengungkapan informasi *SDG* oleh perusahaan-perusahaan terbesar di Nigeria, yang hasilnya menunjukkan kepatuhan yang sangat rendah (Erin et al., 2022). Penelitian de Villiers et al. (2022) menunjukkan bahwa *GRI* tetap mempertahankan posisi globalnya sebagai standar pelaporan keberlanjutan utama, meski bersaing dengan *International Sustainability Standards Board (ISSB) / International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang berorientasi investor. Penerapan standar *GRI*, khususnya standar sektor, secara signifikan meningkatkan kelengkapan dan kualitas pengungkapan topik material perusahaan (I Dewa Ayu Eka et al., 2024).

Kerangka audit dalam penelitian mengintegrasikan prinsip *GRI* untuk menciptakan protokol audit terpadu, terverifikasi, dan relevan secara global (Ilori et al., 2023). Penelitian sebelumnya menemukan adanya peningkatan signifikan baik dari segi jumlah maupun kualitas laporan keberlanjutan setelah diberlakukannya POJK 51/2017, meskipun tingkat kesesuaian dengan *GRI* masih menunjukkan variasi antarindustri. Saran penelitian lanjutan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan dengan membandingkan kebijakan BUMN dan swasta (Pristi & Bandiyono, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya memang telah mengidentifikasi peningkatan kuantitas pengungkapan ESG pasca POJK 51/2017 dari 45 perusahaan (tahun 2018) menjadi 675 perusahaan (tahun 2023) (Sumarwan, 2025; Wanta et al., 2022). Terdapat celah akademik untuk mengevaluasi aspek kualitas pengungkapan, yaitu sejauh mana laporan keberlanjutan yang dihasilkan telah memenuhi standar pelaporan global yang diakui. Pelaporan berkelanjutan masih menghadapi isu relevansi, perbandingan, dan keandalan data, meskipun *GRI* telah menjadi standar global (Luque-Vilchez et al., 2023). Penelitian ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya pengungkapan, tetapi mengevaluasi tingkat kesesuaiannya dengan *GRI Standards 2021*. Penelitian lebih lanjut menunjukkan kualitas laporan keberlanjutan masih rendah, terutama pada pengungkapan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial sesuai standar *GRI* (Sebrina et al., 2023).

Penelitian mengevaluasi dampak POJK 51/2017 terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan konstruksi di BEI dengan menggunakan *GRI Standards 2021*. Penelitian juga menganalisis sebelum dan sesudah penerapan POJK 51/2017 untuk memahami efektivitasnya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta menambah literatur akuntansi keberlanjutan, memberikan masukan bagi regulator, investor dan manajemen perusahaan konstruksi untuk meningkatkan kualitas pengungkapan *ESG*, serta berkontribusi pada praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris kritis dengan menguji efektivitas POJK 51/2017 dalam mendorong keselarasan laporan keberlanjutan emiten konstruksi dengan *GRI Standards 2021*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif longitudinal untuk membandingkan tingkat kesesuaian pengungkapan keberlanjutan sebelum (periode 2015-2017) dan sesudah (periode 2018-2023) implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) kuantitatif terhadap laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Analisis isi adalah studi yang fokus pada apa yang dikatakan dalam komunikasi untuk memahami isi dan cara pesan disampaikan Lasswell (1971) teknik ini umum dipakai dalam penelitian pelaporan keberlanjutan untuk mengukur kualitas pengungkapan berdasarkan keberadaan, kelengkapan, dan kesesuaian indikator sesuai standar pelaporan seperti *GRI*.

Pemilihan periode ini bertujuan untuk mengukur perbedaan tingkat pengungkapan *ESG* akibat kewajiban pelaporan keberlanjutan serta memungkinkan penelitian menilai efektivitas regulasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Instrumen penelitian memiliki item pengungkapan, yaitu pengungkapan umum, tata kelola, lingkungan, dan sosial, yang dinilai berdasarkan pengungkapan dalam laporan keberlanjutan dengan skor 1 (terungkap) atau 0 (tidak terungkap),

sehingga memungkinkan penghitungan skor total pengungkapan ESG setiap perusahaan per tahun. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor konstruksi dan infrastruktur yang terdaftar di BEI hingga tahun 2023 dengan metode *purposive sampling*.

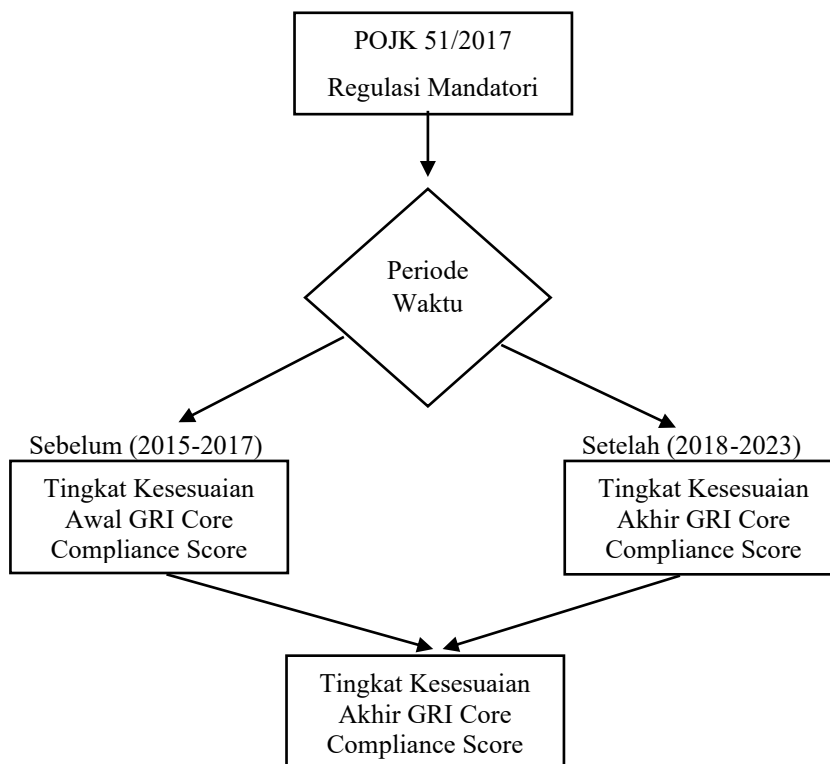
Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen resmi perusahaan dan lembaga terkait, diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan melalui situs resmi perusahaan dan BEI. Penelitian juga menggunakan dokumen pendukung seperti *GRI Standards 2021* dan POJK 51/2017, yang berfungsi sebagai dasar dalam pembangunan instrumen dan kriteria penilaian tingkat kesesuaian pengungkapan keberlanjutan.

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di BEI secara konsisten dari 2015 hingga 2023. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (Sekaran & Bougie, 2013), dipilih 8 perusahaan yang memenuhi kriteria, tercatat di BEI selama periode penelitian penuh, dan mempublikasikan laporan tahunan/ laporan keberlanjutan. Sampel terdiri dari 4 emiten swasta, PT Acset Indonusa Tbk (ACST), PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON), PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL), dan 4 emiten BUMN, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) untuk memungkinkan analisis perbandingan.

Kerangka konsep penelitian ini berangkat dari premis bahwa regulasi mandatori berfungsi sebagai mekanisme *coercive isomorphism* yang mendorong organisasi untuk menelaraskan praktik dan pelaporannya dengan standar yang diakui, guna memperoleh atau mempertahankan legitimasi.

POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keberlanjutan berperan sebagai variabel independen utama yang dihipotesiskan memengaruhi variabel dependen, yaitu tingkat kesesuaian pengungkapan keberlanjutan (*GRI Core Compliance Score*). Hubungan ini dimoderasi oleh variabel kontekstual, yaitu jenis kepemilikan perusahaan (BUMN vs. Swasta), yang diasumsikan mempengaruhi intensitas respons terhadap regulasi karena perbedaan tekanan legitimasi dan sumber daya.

Kerangka ini dioperasionalisasikan melalui analisis konten kuantitatif yang mengukur perubahan pada variabel dependen di dua titik waktu: periode sebelum (2015-2017) dan sesudah (2018-2023) regulasi. Perbandingan ini dirancang untuk mengisolasi dampak regulasi, sekaligus menganalisis perbedaan pola antara kelompok BUMN dan swasta. Berikut adalah diagram dari kerangka konseptual:



Gambar 1. Diagram Kerangka Konseptual

Variabel dan pengukuran dalam penelitian ini:

- Variabel Dependen: Tingkat Kesesuaian Pengungkapan dengan GRI Standards 2021, dioperasionalisasikan sebagai *GRI Core Compliance Score*.
- Variabel Independen: Periode Regulasi (sebelum POJK/2015-2017; sesudah POJK/2018-2023) dan Jenis Kepemilikan (swasta; BUMN).
- Instrumen Pengukuran: Dibangun indeks pengungkapan (*disclosure index*) berdasarkan indikator inti dalam GRI 2: Pengungkapan Umum dan GRI 3: Topik Material (GRI, 2021). Setiap indikator diskor dengan skala 0-1-10: 0 (tidak

diungkap), 1 (diungkap), dan 10 (diungkap serta telah di-*assurance* eksternal). Total skor perusahaan kemudian dinormalisasi menjadi *GRI Core Compliance Score* (persentase).

Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan *GRI 4*, *GRI 2016* dan *GRI Standards 2021*, fokus pada *GRI 2* (Pengungkapan Umum) dan *GRI 3* (Topik Material) untuk menilai kualitas, kelengkapan, dan kedalaman pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Kedua standar ini menjadi dasar penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan *GRI 2* secara rinci mencakup identitas, tata kelola, etika, partisipasi pemangku kepentingan, dan mekanisme pelaporan.

Analisis data menggunakan analisis konten kuantitatif untuk mengukur kesesuaian laporan keberlanjutan perusahaan dengan standar *GRI 2021*. Pendekatan ini mengubah data kualitatif menjadi data numerik terukur, sehingga memungkinkan perbandingan sistematis antarperiode dan antarperusahaan.

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai perubahan kualitas dan kesesuaian pengungkapan keberlanjutan sektor konstruksi Indonesia, baik dalam konteks sebelum dan sesudah POJK 51/2017 serta menjadikan perumusan hipotesa terdapat peningkatan signifikan *GRI Core Compliance Score* pada emiten konstruksi setelah implementasi POJK 51/2017.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Periode sebelum regulasi POJK 51/2017, tingkat pengungkapan masih tergolong rendah dengan rata-rata skor 16 poin dari total 58 poin atau rata-rata 27% atas pengungkapan umum *GRI 4* rentang tahun 2015-2017 dan rata-rata skor 9 poin dari total 91 poin atau rata-rata 9% atas pengungkapan material topik *GRI 4* rentang tahun 2015-2017. Informasi yang diungkap sebagian besar perusahaan hanya mencantumkan data laporan *CSR* atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan tanpa sistematis indikator sehingga tidak dapat dihitung dalam tingkat pengungkapan indikator *GRI*. Dari 8 sampel penelitian ada 3 emiten swasta dan 1 emiten BUMN yang menggunakan laporan *CSR* dalam rentang tahun 2015-2018, hanya 1 emiten swasta (TOTL) yang telah menerapkan standar *GRI* dalam pelaporan keberlanjutan.

Tabel 1. Rata-Rata Persentase Tingkat Pengungkapan *GRI 4*

No	Kode Emiten	Standar Umum Jumlah Indikator=58						Standar Topik Jumlah Indikator=91					
		2015		2016		2017		2015		2016		2017	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	ACST	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2	JKON	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
3	SSIA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
4	TOTL	53	91%	53	91%	53	91%	33	36%	33	36%	33	36%
5	ADHI	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6	PTPP	29	50%	0	0%	-	-	42	46%	0	0%	-	-
7	WIKA	46	79%	46	79%	-	-	22	24%	9	10%	-	-
8	WSKT	35	60%	35	60%	-	-	7	8%	7	8%	-	-
Rata-rata						16	27%	Rata-rata				9	9%

Tabel 1 (2015-2017) mengungkap kerapuhan pelaporan *GRI G4* era pra-regulasi: mayoritas emiten tidak melapor (0%), sementara inisiatif sukarela dari pelopor seperti TOTL dan WIKA bersifat tidak konsisten dan mengalami penurunan drastis, menandakan adopsi simbolis tanpa tekanan regulasi. Kesenjangan besar antara pengungkapan prosedural (TOTL: 91%) dan kinerja substantif (36%) mengindikasikan strategi manajemen kesan yang mengutamakan bentuk. Data ini menjadi bukti kritis mengapa intervensi koersif POJK 51/2017 dibutuhkan untuk mentransformasi praktik sukarela yang rapuh menjadi kerangka pelaporan yang sistematis dan terdorong kepatuhan.

Rentang periode saat regulasi POJK 51/2017 dan *GRI Standards 2021* ada masa transisi dimana emiten konstruksi telah menggunakan *GRI 2016* namun jelang tahun 2021 belum menerapkan *GRI Standards 2021* dalam tahun 2017-2021. Rata-rata tingkat pengungkapan *GRI 2016* masih tergolong rendah namun telah meningkat dari pengungkapan *GRI 4* dengan rata-rata skor 31 poin dari total 56 poin atau rata-rata 55% atas pengungkapan umum *GRI 2016* dan rata-rata skor 25 poin dari total 72 poin atau rata-rata 35% atas pengungkapan material topik *GRI 2016* rentang tahun 2017-2021. Pelaporan *CSR* masih dilakukan oleh 3 emiten swasta, namun emiten BUMN telah menerapkan pengungkapan dengan standar *GRI 2016*.

Tabel 2 (a). Rata-Rata Persentase Tingkat Pengungkapan *GRI 2016*

No	Kode Emiten	Standar Umum Jumlah Indikator=56									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	ACST	-	-	0	0%	0	0%	0	0%	-	-
2	JKON	-	-	0	0%	0	0%	0	0%	-	-

No	Kode Emiten	Standar Umum									
		Jumlah Indikator=56									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
3	SSIA	-	-	0	0%	0	0%	30	54%	-	-
4	TOTL	-	-	39	70%	39	70%	39	70%	39	70%
5	ADHI	-	-	33	59%	33	59%	33	59%	33	59%
6	PTPP	33	59%	31	55%	33	59%	33	59%	33	59%
7	WIKA	43	77%	41	73%	65	116%	65	116%	65	116%
8	WSKT	33	59%	40	71%	40	71%	41	73%	28	50%
Rata-rata										31	55%

Tabel 2 (b). Rata-Rata Persentase Tingkat Pengungkapan GRI 2016

No	Kode Emiten	Standar Topik									
		Jumlah Indikator=72									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	ACST	-	-	0	0%	0	0%	0	0%	-	-
2	JKON	-	-	0	0%	0	0%	0	0%	-	-
3	SSIA	-	-	0	0%	0	0%	26	36%	-	-
4	TOTL	-	-	32	44%	38	53%	38	53%	40	56%
5	ADHI	-	-	13	18%	27	38%	29	40%	29	40%
6	PTPP	27	38%	28	39%	43	60%	43	60%	35	49%
7	WIKA	13	18%	29	40%	46	64%	46	64%	54	75%
8	WSKT	16	22%	31	43%	29	40%	39	54%	39	54%
Rata-rata										25	35%

Tabel 2 (a) dan Tabel 2 (b) mengenai pengungkapan *GRI 2016* (periode 2017-2021) menunjukkan respons langsung dan bertahap emiten konstruksi terhadap pemberlakuan POJK 51/2017, di mana terjadi peningkatan kesenjangan strategis antara BUMN dan swasta. BUMN secara kolektif merespons cepat pada 2017-2018 dengan skor pengungkapan umum yang tinggi (rata-rata 55%), mencerminkan kapasitas adaptif terhadap tekanan regulasi koersif, sementara mayoritas emiten swasta tetap pada level nol hingga 2020 sebelum menunjukkan lompatan yang seragam namun terbatas. Kesenjangan yang dalam antara kinerja Standar Umum dan Standar Topik pada semua emiten, dengan rata-rata topik substantif hanya 25%, mengungkap bahwa peningkatan awal pasca-regulasi masih sangat terkonsentrasi pada pemenuhan persyaratan tata kelola dan prosedural, belum pada pengungkapan kinerja keberlanjutan yang mendalam, sehingga mengonfirmasi bahwa efektivitas POJK 51/2017 pada fase ini lebih sebagai pendorong keselarasan struktural daripada pendorong transformasi kinerja yang substantif.

Periode pengungkapan setelah implementasi POJK 51/2017, skor rata-rata meningkat secara signifikan 25 poin dari total 33 poin pengungkapan umum atau sebesar 67% dan rata-rata skor 39 poin dari total 89 poin atau rata-rata 44% atas pengungkapan material topik *GRI Standards 2021* rentang tahun 2017-2021. Perusahaan BUMN PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Pembangunan Perumahan (PTPP) mencapai tingkat kesesuaian pengungkapan di atas 65% terhadap indikator *GRI Standards 2021* sejak tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan regulasi dalam mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan terstruktur dalam menyajikan laporan keberlanjutan.

Tabel 3. Persentase Tingkat Pengungkapan GRI Standards 2021

No	Kode Emiten	Standar Umum						Standar Topik					
		Jumlah Indikator=58						Jumlah Indikator=91					
		2021		2022		2023		2021		2022		2023	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	ACST	-	-	0	0%	32	97%	0	0%	32	36%	0	0%
2	JKON	-	-	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
3	SSIA	25	76%	27	82%	36	109%	41	46%	54	61%	41	46%
4	TOTL	-	-	24	73%	25	43%	44	49%	58	65%	44	49%
5	ADHI	-	-	24	73%	26	45%	48	54%	48	54%	48	54%
6	PTPP	-	-	33	100%	33	57%	47	53%	52	58%	47	53%
7	WIKA	-	-	42	127%	42	72%	14	16%	23	26%	14	16%
8	WSKT	-	-	30	91%	24	41%	44	49%	58	65%	44	49%
Rata-rata						25	67%	Rata-rata		39	44%		

Berdasarkan Tabel 3 data pengungkapan *GRI Standards 2021* (periode 2021-2023), dapat disimpulkan bahwa terjadi percepatan dan konsolidasi struktural dalam pelaporan, namun diiringi dengan polarisasi performa yang semakin jelas. Mayoritas emiten, baik BUMN (PTPP, WIKA, WSKT) maupun swasta (SSIA, TOTL, ADHI), mengalami lonjakan

signifikan dalam pengungkapan umum (*GRI 2: Pengungkapan Umum*) pada 2022, yang menunjukkan upaya sistematis untuk memenuhi kerangka tata kelola baru. Namun, transisi ke pengungkapan topik material yang substantif (*GRI 3*) masih sangat tertinggal dan tidak konsisten, sebagaimana terlihat dari rata-rata yang jauh lebih rendah (67% untuk *GRI 2* vs. 44% untuk *GRI 3*) dan praktis nihilnya pengungkapan topik material sebelum 2023 pada banyak perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis konten terhadap laporan tahunan dan laporan keberlanjutan periode 2015-2023, ditemukan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat kesesuaian pengungkapan keberlanjutan (*GRI compliance score*) di perusahaan konstruksi yang menjadi sampel penelitian, setelah penerapan POJK 51/2017.

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa BUMN konstruksi secara konsisten melakukan tingkat kesesuaian pengungkapan laporan keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan konstruksi swasta. Rata-rata *GRI compliance score* BUMN Karya pada periode 2015-2023 mencapai 58,9 poin atau 46% (ADHI, PTPP, WIKA, dan WSKT), sedangkan perusahaan konstruksi swasta (ACST, JKON, SSIA, dan TOTL) hanya 30,6 poin atau 24%.

Tabel 4. Rata-rata Persentase Tingkat Pengungkapan GRI 4, 2016, 2021

No	Kode Emiten	GRI 4		GRI 2016		GRI 2021		Rata-rata		Peringkat
		Jml Indikator=149		Jml Indikator=149		Jml Indikator=149		Jumlah	%	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%			
1	ACST	0	0%	0	0%	32	26%	11	9%	7
2	JKON	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	8
3	SSIA	0	0%	19	15%	77	63%	32	26%	6
4	TOTL	86	58%	76	59%	79	64%	80	60%	2
5	ADHI	0	0%	58	45%	76	62%	45	36%	5
6	PTPP	24	16%	68	53%	81	66%	57	45%	3
7	WIKA	62	41%	93	73%	92	75%	82	63%	1
8	WSKT	42	28%	67	53%	46	37%	52	39%	4
Rata-rata Swasta								30,65	24%	
Rata-rata BUMN								58,92	46%	

Tabel 4 mengenai analisis longitudinal tiga generasi standar GRI mengungkap polarisasi tajam dalam evolusi pelaporan: WIKA dan TOTL menunjukkan kinerja konsisten tinggi (rata-rata >60%) sebagai pelopor strategis, sementara mayoritas emiten lain bergerak dari titik nol di era G4, merangkak naik pasca-POJK 51/2017, dan baru signifikan saat transisi ke GRI 2021. Temuan ini menyimpulkan bahwa POJK 51/2017 berhasil menciptakan kepatuhan minimal, namun belum mampu menyamakan kesenjangan mendasar dalam kapasitas organisasi dan internalisasi strategis keberlanjutan dengan dukungan faktor internal perusahaan yang kompleks..

3.2 Pembahasan

BUMN konstruksi memiliki kewajiban langsung untuk melaporkan implementasi keuangan berkelanjutan sesuai POJK 51/2017 serta mendapatkan pengawasan BP BUMN dan OJK. Tekanan pemangku kepentingan membuat BUMN konstruksi lebih terdorong untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar global, terutama *GRI Standards 2021*. Perusahaan konstruksi swasta umumnya masih menggunakan laporan keberlanjutan sebagai strategi reputasi atau pemenuhan permintaan investor, bukan sebagai kewajiban tata kelola. Kesenjangan kinerja ini memperkuat proposisi *institutional theory* bahwa BUMN mengalami tekanan legitimasi ganda (*dual legitimacy pressure*), baik dari regulator sebagai entitas publik maupun dari pasar sebagai entitas terbuka, yang mendorong adopsi standar global secara lebih substantif. Temuan ini memberikan nuansa baru bagi teori dengan menunjukkan bahwa tipe kepemilikan negara berfungsi sebagai penguat mekanisme *coercive isomorphism*, suatu dinamika yang kurang terjelajahi dalam konteks pasar berkembang. Perusahaan konstruksi swasta juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan atas pelaporan keberlanjutan sejak tahun 2020, seiring meningkatnya kesadaran terhadap prinsip ESG di kalangan emiten konstruksi. Pola ini mengindikasikan bahwa POJK 51/2017 berhasil menciptakan *level playing field* dasar, namun belum cukup mendorong pengungkapan substantif pada isu material yang kompleks. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pedoman teknis yang lebih spesifik-sektor untuk membantu perusahaan, khususnya swasta, dalam mengidentifikasi dan melaporkan aspek material seperti dampak rantai pasok dan keanekaragaman hayati, yang merupakan lompatan dari kepatuhan menuju integrasi. Berdasarkan tiga dimensi utama GRI, hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi lingkungan mengalami peningkatan signifikan, diikuti oleh dimensi sosial dan ekonomi.

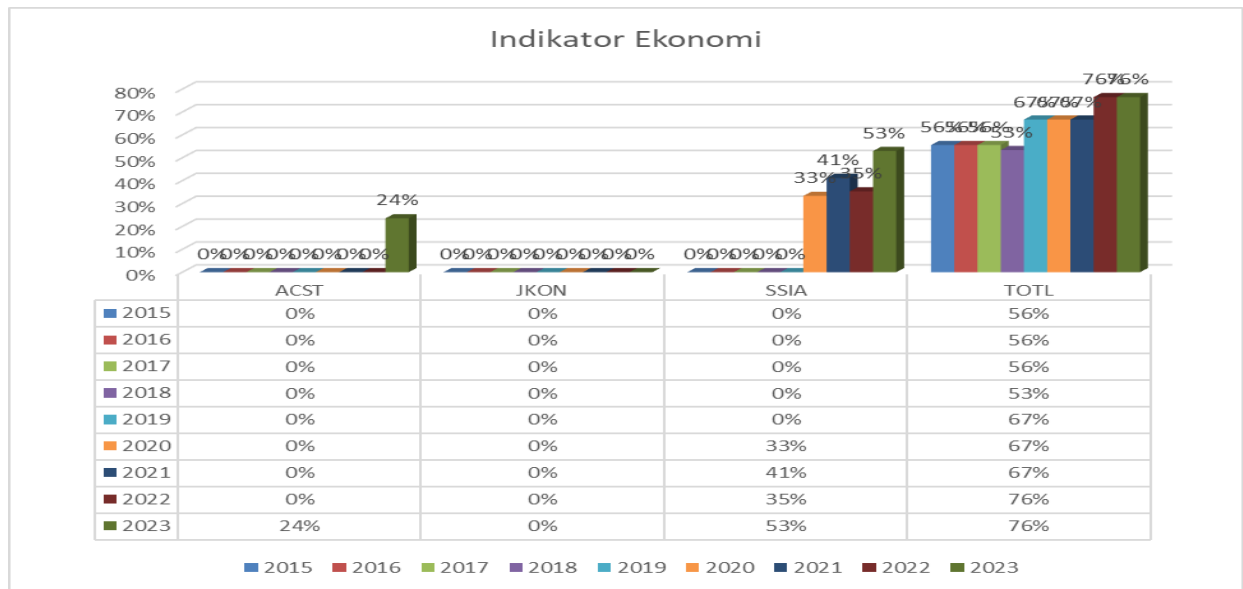
3.3 Topik Material

Berdasarkan analisis data tabel dan grafik dalam sampel penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas signifikan dalam pengungkapan topik material ekonomi, lingkungan, dan sosial antara perusahaan BUMN dan swasta konstruksi, di mana BUMN secara konsisten menunjukkan cakupan dan kedalaman pelaporan yang lebih komprehensif serta berkelanjutan.

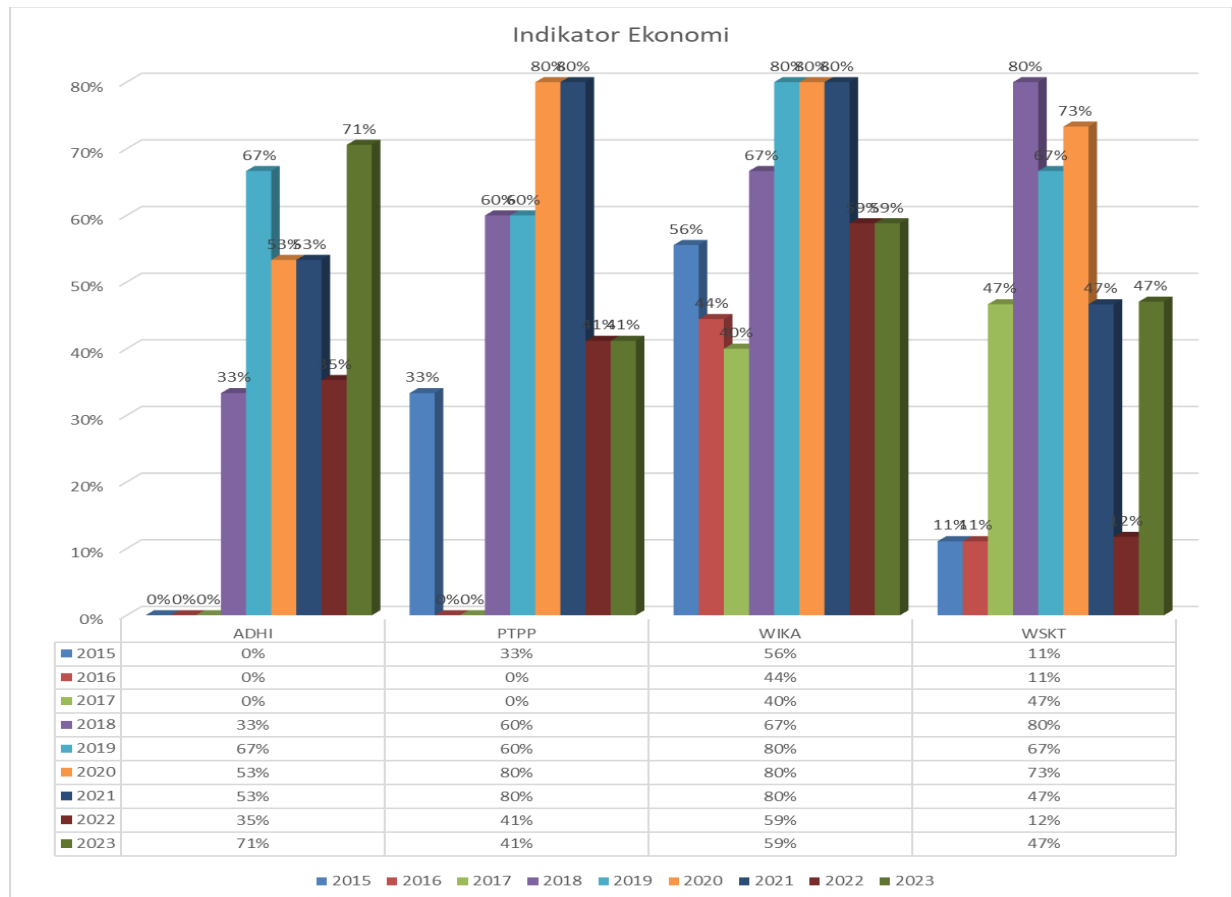
3.3.1 Aspek Ekonomi (GRI 201- GRI 207)

Temuan mengenai pelaporan indikator ekonomi GRI mengungkap pergeseran paradigma dalam pengukuran nilai yang diperkenalkan oleh standar keberlanjutan global, di mana kinerja perusahaan tidak lagi direduksi semata-mata pada metrik

finansial. Peningkatan yang konsisten pada BUMN konstruksi menunjukkan adopsi prinsip *integrated thinking*, di mana dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan mulai dipertimbangkan dalam strategi bisnis. Namun, kesenjangan yang lebar dengan perusahaan swasta dan variasi kualitas yang tinggi, ditandai oleh minimnya pengungkapan kritis seperti proporsi belanja lokal atau kesetaraan upah, mengindikasikan bahwa adopsi GRI masih berada pada spektrum antara legitimasi simbolis dan integrasi substantif. Implikasi teoretisnya, temuan ini mendukung teori *legitimacy* sekaligus menyoroti batasannya, di mana tekanan regulasi (POJK 51) berhasil mendorong pengungkapan namun belum sepenuhnya menjamin kualitas informasi dan perubahan praktik manajerial yang mendasar. Laporan keberlanjutan didorong beralih dari sekadar formalitas pelaporan menjadi instrumen akuntabilitas yang efektif, diperlukan konvergensi yang lebih kuat antara tekanan regulasi, kapasitas internal perusahaan, dan permintaan informasi yang kritis dari pemangku kepentingan.



Gambar 2. Grafik Indikator Ekonomi Emiten Swasta

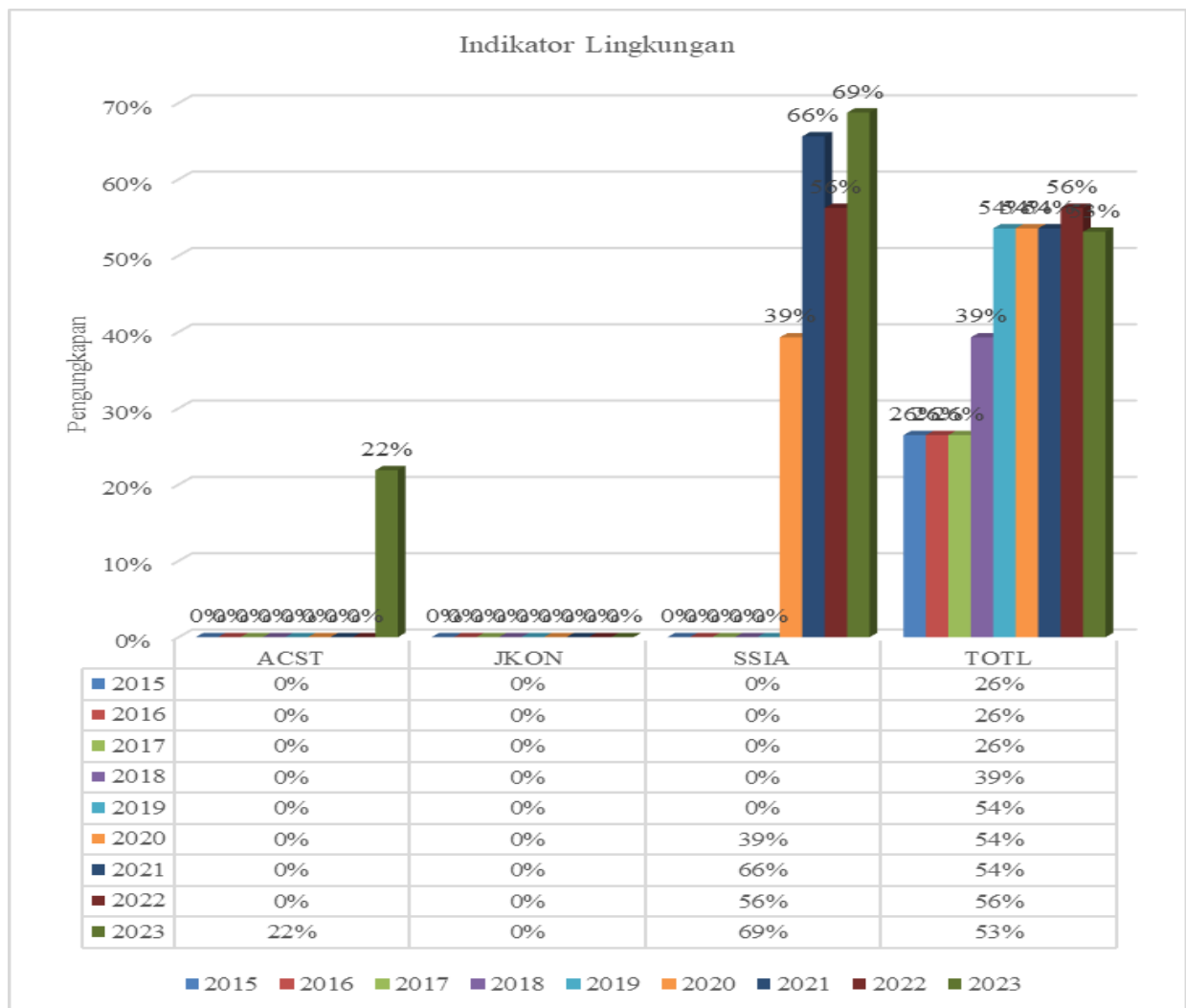


Gambar 3. Grafik Indikator Ekonomi Emiten BUMN

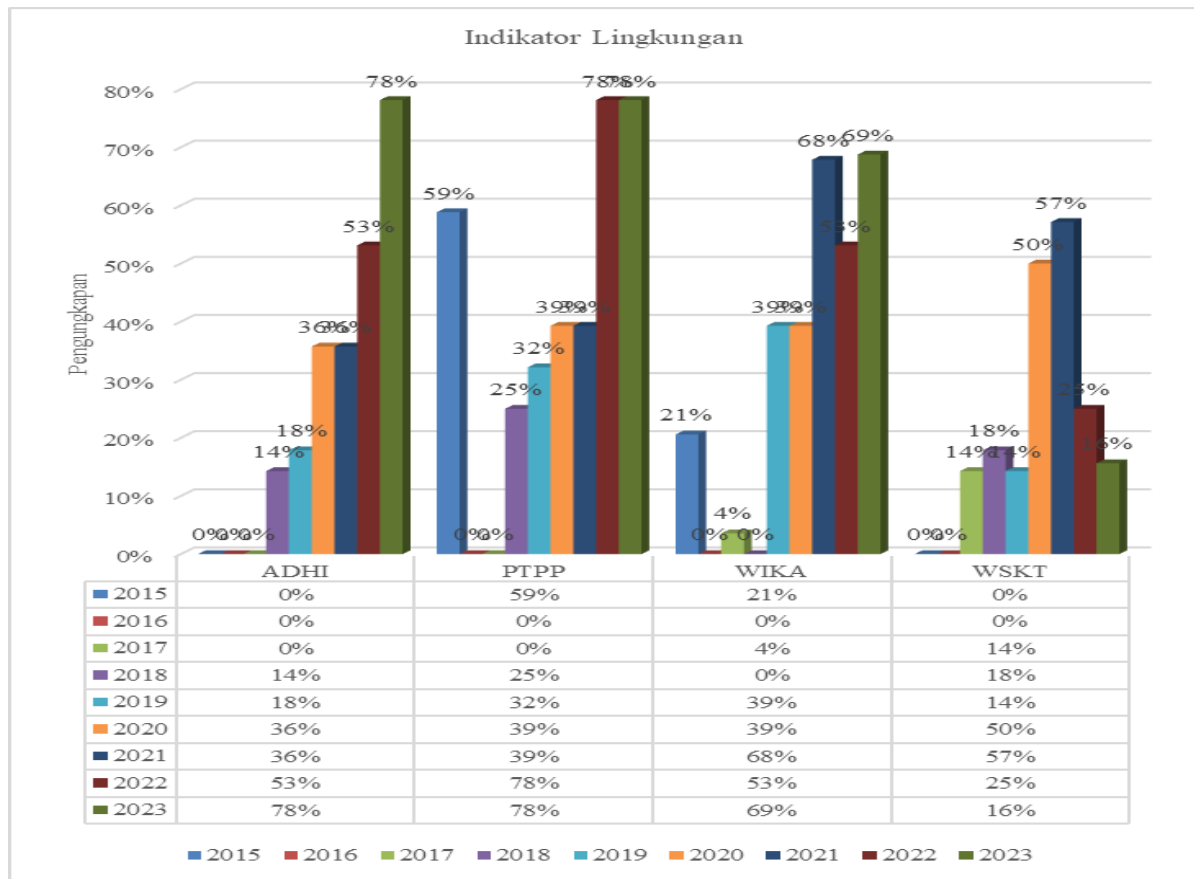
Berdasarkan Gambar 2 dan Gambar 3 analisis data kedua grafik, terlihat perbedaan yang mencolok dalam pola adopsi indikator ekonomi GRI antara BUMN dan emiten swasta konstruksi. BUMN seperti PTPP dan WIKA menunjukkan peningkatan pengungkapan yang signifikan sejak 2015, dengan tingkat kepatuhan mencapai puncak 80% sebelum mengalami fluktuasi, mengindikasikan integrasi awal namun masih dinamis. Sementara itu, emiten swasta secara konsisten tidak melaporkan indikator ini hingga 2020, dan baru menunjukkan lonjakan drastis pada 2023, terutama didorong oleh TOTL yang mencapai 76%. Pola ini mengonfirmasi bahwa regulasi POJK 51/2017 berfungsi sebagai *critical juncture* yang mempercepat adopsi, terutama bagi BUMN yang lebih responsif sejak awal karena tuntutan akuntabilitas publik. Namun, fluktuasi skor BUMN pasca-2020 dan keterlambatan adopsi emiten swasta mengisyaratkan bahwa pendekatan pelaporan masih bersifat reaktif (*compliance-driven*) dan belum mencerminkan integrasi strategis keberlanjutan ekonomi yang matang dan berkelanjutan dalam model bisnis.

3.3.2 Aspek lingkungan (GRI 301- GRI 308)

Analisis terhadap indikator lingkungan GRI mengungkap sebuah paradoks dalam pelaporan keberlanjutan, peningkatan yang terukur pada aspek-aspek operasional dasar, seperti energi dan emisi langsung, seiring dengan aturan yang ketat, berhadapan dengan pengungkapan yang masih minim pada dimensi lingkungan yang lebih kompleks dan sistemik, seperti keanekaragaman hayati dan emisi rantai pasok. Pola ini mengindikasikan bahwa respons perusahaan masih bersifat reaktif dan terfragmentasi, didorong oleh kepatuhan terhadap regulasi dan tekanan legitimasi, bukan oleh integrasi prinsip lingkungan yang holistik ke dalam inti strategi dan model bisnis. Secara teoretis, temuan ini memperkuat kritik terhadap *greenwashing* dan pendekatan *symbolic management*, di mana perusahaan memprioritaskan pengungkapan aspek yang mudah diukur dan terlihat untuk membangun citra perusahaan, namun mengabaikan dampak tidak langsung yang justru sering kali lebih material. Implikasinya, nilai transformatif dari standar seperti *GRI* akan tetap terbatas jika tidak didukung oleh perbaikan mendasar dalam sistem pengelolaan data, audit internal yang ketat, dan adopsi teknologi yang memungkinkan pelacakan dampak hingga ke seluruh rantai nilai. Transparansi pelaporan keberlanjutan yang sejati harus dimulai dari perubahan dalam praktik operasional, yang kemudian tercermin dalam laporan.



Gambar 4. Grafik Indikator Lingkungan Emiten Swasta



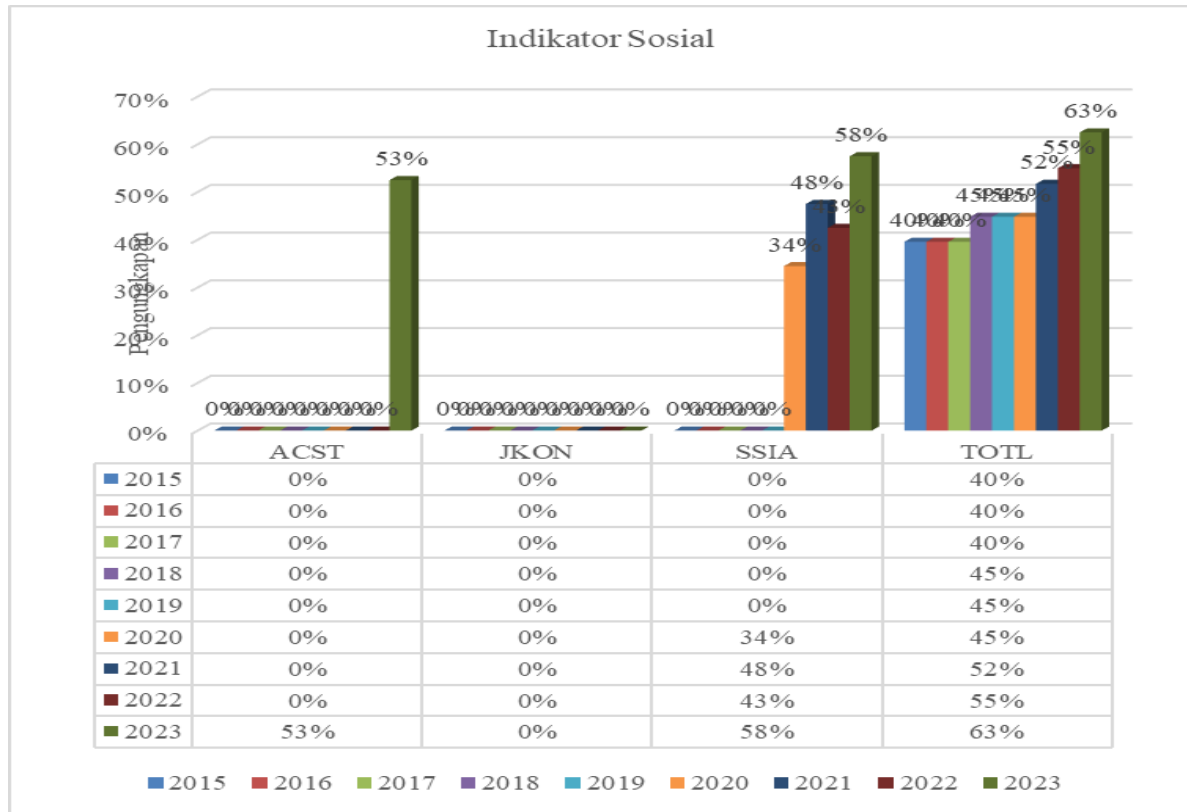
Gambar 5. Grafik Indikator Lingkungan Emiten BUMN

Berdasarkan Gambar 4 dan Gambar 5 analisis data kinerja lingkungan, terlihat perbedaan strategis yang jelas antara BUMN dan emiten swasta. Emiten swasta, terutama TOTL, menunjukkan peningkatan pengungkapan yang konsisten sejak awal (26% pada 2015 menjadi 53-69% pada 2023), mencerminkan inisiatif sukarela dan integrasi bertahap sebelum adanya tekanan regulasi yang kuat. Sebaliknya, BUMN seperti ADHI dan PTPP baru menunjukkan respons signifikan setelah 2020, dengan lonjakan tajam namun sering diikuti oleh penurunan yang drastis pada 2023, mengindikasikan pendekatan yang reaktif untuk memenuhi persyaratan. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun BUMN lebih cepat merespons tekanan regulasi langsung, emiten swasta justru menunjukkan fondasi dan konsistensi yang lebih matang dalam pelaporan lingkungan dalam jangka panjang, menantang asumsi umum bahwa BUMN selalu lebih unggul dalam aspek tata kelola non-keuangan.

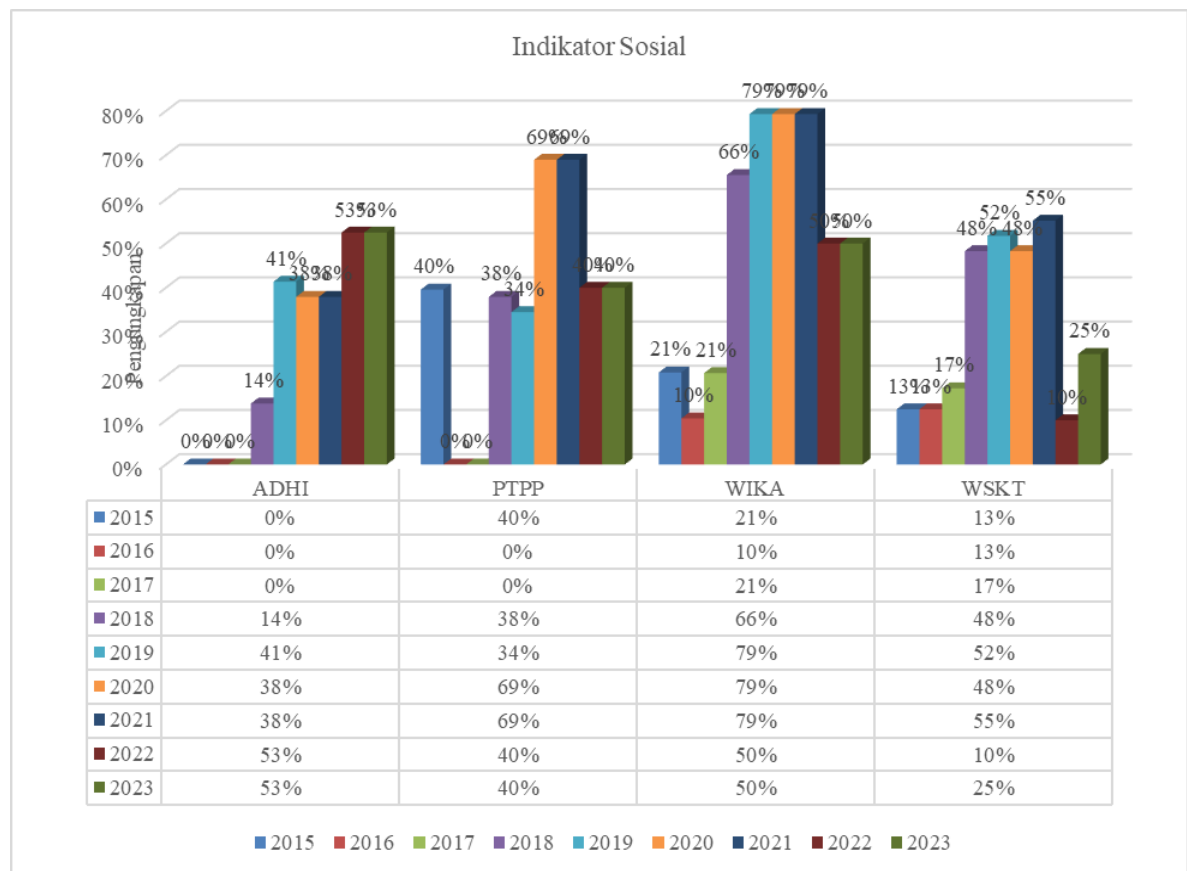
Perbedaan pola ini dapat dikaitkan dengan dinamika tata kelola yang berbeda antara kedua jenis perusahaan. BUMN, dengan fokus utama pada kepatuhan terhadap kebijakan negara dan arahan langsung dari regulator, mungkin cenderung mengadopsi pendekatan berbasis kepatuhan (*compliance-based*) yang bersifat reaktif dan terpaku pada target regulasi spesifik. Sementara itu, emiten swasta menghadapi tekanan dari pemegang saham, pelanggan global, dan lembaga pemeringkat yang lebih beragam, mendorong mereka untuk mengembangkan kerangka keberlanjutan internal yang lebih sistematis dan proaktif sebagai bagian dari strategi kompetitif jangka panjang. Temuan ini, sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 4 dan 5, menyoroti bahwa efektivitas penerapan standar keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh status kepemilikan, tetapi lebih pada kedalaman komitmen strategis dan kapasitas manajerial untuk menginternalisasikan praktik-praktik tersebut ke dalam operasi inti perusahaan.

3.3.3 Aspek sosial (GRI 401- GRI 419)

Analisis indikator sosial GRI mengungkap kesenjangan antara struktur pengungkapan dan substansi pengelolaan hubungan sosial. Kerangka GRI menyediakan peta komprehensif, namun pelaporan BUMN masih bersifat reaktif dan didominasi oleh topik operasional seperti kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dengan pengungkapan yang minimal pada isu-isu struktural seperti kesetaraan gender, kebebasan berserikat, dan hak asasi manusia dalam rantai pasok. Temuan ini memperkuat perspektif bahwa adopsi standar global sering kali bersifat *ceremonial* dan terpisah dari praktik inti, di mana perusahaan memenuhi *form* pelaporan tanpa menginternalisasi prinsipnya. Hal ini membutuhkan integrasi prinsip sosial ke dalam strategi bisnis, diperkuat oleh audit independen yang ketat, serta mekanisme pelibatan pemangku kepentingan yang otentik dan berdampak pada pengambilan keputusan.



Gambar 6. Grafik Indikator Sosial Emiten Swasta



Gambar 7. Grafik Indikator Sosial Emiten BUMN

Berdasarkan Gambar 6 dan Gambar 7 analisis data indikator sosial *GRI*, terlihat pola yang sangat kontras antara emiten swasta dan BUMN. Emiten swasta, kecuali TOTL yang menunjukkan kinerja konsisten di atas 40% sejak 2015, pada dasarnya tidak melakukan pengungkapan sosial yang berarti (0% untuk ACST, JKON, SSIA). Sebaliknya, BUMN

menunjukkan variasi dinamik yang signifikan; perusahaan seperti WIKA dan PTPP sempat mencapai puncak pengungkapan mendekati 80% pada periode 2019-2021, namun mengalami penurunan drastis pada tahun-tahun berikutnya. Pola fluktuasi yang tajam pada BUMN ini mengindikasikan bahwa pelaporan sosial mereka mungkin lebih dipengaruhi oleh siklus proyek tertentu, tekanan jangka pendek, atau perubahan prioritas manajemen, daripada sebagai hasil dari strategi dan sistem manajemen sosial. Temuan ini menguatkan bahwa peningkatan kuantitas pengungkapan tidak serta-merta menjamin konsistensi dan kedalaman integrasi prinsip sosial ke dalam operasi inti perusahaan.

Berdasarkan analisis terhadap penerapan *GRI 2* (pengungkapan umum) dan *GRI 3* (topik material), penelitian ini menyimpulkan bahwa POJK 51/2017 berperan sebagai katalis institusional yang kritis. Regulasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan kepatuhan administratif, tetapi secara khusus telah mempercepat adopsi pendekatan berbasis materialitas sebagaimana diamanatkan *GRI Standards 2021*. Peningkatan signifikan dalam pengungkapan proses identifikasi isu material pasca-2020 menunjukkan pergeseran dari pelaporan yang umum menuju pelaporan yang lebih kontekstual. Namun, temuan penelitian bahwa hanya separuh perusahaan yang mampu mengaitkan topik material dengan tujuan strategisnya mengungkap batasan dari pendekatan *compliance-driven*. Hal ini mengindikasikan bahwa adopsi kerangka *GRI* sering kali masih bersifat prosedural dan *terdecoupling (ceremonial adoption)*, di mana perusahaan memenuhi bentuk pelaporan tanpa menginternalisasi esensi materialitas ke dalam inti strategi dan pengambilan keputusan.

Penelitian mengungkap variasi respons strategis yang sistematis berdasarkan tipe kepemilikan. BUMN konstruksi menunjukkan adaptasi yang lebih cepat dan konsisten, yang didorong oleh mandat tata kelola publik dan pengawasan regulator yang lebih ketat. Sebaliknya, perusahaan swasta secara umum memerlukan dorongan eksternal tambahan seperti insentif pasar dan tekanan investor untuk mencapai kedalaman pengungkapan yang setara. Implikasinya, untuk mentransformasi pelaporan keberlanjutan dari formalitas menjadi instrumen akuntabilitas yang substantif, diperlukan konvergensi antara kepatuhan regulasi, pembangunan kapasitas internal organisasi, dan permintaan informasi yang kritis dari pemangku kepentingan. Standar *GRI 2* dan *GRI 3* tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai kerangka diagnostik untuk menilai sejauh mana prinsip keberlanjutan telah terintegrasi ke dalam tata kelola dan strategi perusahaan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menilai dampak penerapan POJK 51/2017 terhadap kesesuaian pengungkapan keberlanjutan perusahaan konstruksi terdaftar BEI periode 2015-2023, melalui analisis konten laporan keberlanjutan berdasarkan *GRI 4*, *GRI 2016*, dan *GRI Standards 2021*. BUMN konstruksi lebih unggul dalam konsistensi dan kedalaman pengungkapan umum, didorong oleh mandat tata kelola publik dan regulasi yang ketat. Sementara perusahaan swasta masih dalam tahap pematangan, dengan peningkatan signifikan setelah tahun 2020 namun masih perlu memperkuat transparansi pada aspek tata kelola dan akuntabilitas sosial, lingkungan tidak hanya pada operasional dan profil perusahaan. BUMN konstruksi seperti WIKA, PTPP, WSKT menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan yang lebih tinggi dan konsisten dari tahun ke tahun, terutama sejak 2018–2023, dengan rata-rata pengisian indikator *GRI 2* mendekati 80-100% untuk aspek dasar seperti struktur organisasi, tata kelola, dan pernyataan keberlanjutan. Kedua kelompok emiten konstruksi menunjukkan tren positif menuju pelaporan yang lebih komprehensif, meski kesenjangan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan antara BUMN konstruksi dan swasta konstruksi masih tampak jelas, terutama pada aspek tata kelola keberlanjutan dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat dan pemerintah. BUMN konstruksi secara konsisten menunjukkan cakupan dan kedalaman pelaporan yang lebih komprehensif serta berkelanjutan, terutama pada aspek lingkungan seperti pengelolaan energi dan emisi (*GRI 302 & 305*) dan aspek sosial seperti kesehatan dan keselamatan kerja (*GRI 403*) serta pelatihan karyawan, yang merefleksikan respons strategis terhadap mandat tata kelola publik dan regulasi nasional. Meskipun perusahaan swasta mengalami peningkatan pesat 2021–2023 terutama TOTL yang konsisten melakukan pelaporan keberlanjutan sejak tahun 2015, pengungkapan topik material berisiko tinggi; keanekaragaman hayati, dampak sosial rantai pasokan masih terbatas, menunjukkan pendekatan keberlanjutan reaktif, namun belum holistik. Setelah penerapan POJK 51/2017, perusahaan BUMN dan swasta memperkuat area utama seperti indikator *GRI 2* dan *3*, yang terlihat dari upaya sistematis untuk mengidentifikasi isu material, meningkatkan transparansi tata kelola, dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam struktur organisasi serta proses pengambilan keputusan. Pelaporan *GRI* di Indonesia, khususnya di sektor BUMN konstruksi (infrastruktur), telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal kepatuhan dan kedalaman. Meski masih ada celah dalam pengungkapan topik tertentu, trennya positif menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Keterbatasan utama penelitian ini adalah penggunaan *purposive sampling* yang hanya meliputi delapan emiten konstruksi, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi sektor atau industri lain di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan menganalisis hubungan kausal antara kualitas pengungkapan *GRI*, asuransi eksternal (*assurance*), dan kinerja pasar saham emiten konstruksi di Indonesia.

REFERENCES

- Adeng Pustikaningsih, Karunia, A. N., Buchori, W. P. M., Septiningdyah Arianisari, Ardhana Reswari Hasna Pratista, & Indarto Waluyo. (2024). The Effect of Stakeholder Pressure on Sustainability Report Exposition. *Journal of Vocational Applied Research and Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21831/jvars.v1i2.807>

- de Villiers, C., La Torre, M., & Molinari, M. (2022). The Global Reporting Initiative's (GRI) past, present and future: critical reflections and a research agenda on sustainability reporting (standard-setting). *Pacific Accounting Review*, 34(5), 728–747. <https://doi.org/10.1108/PAR-02-2022-0034>
- Erin, O. A., Bamigboye, O. A., & Oyewo, B. (2022). Sustainable development goals (SDG) reporting: an analysis of disclosure. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(5), 761–789. <https://doi.org/10.1108/JAEE-02-2020-0037>
- E-Vahdati, S., & Aripin, N. (2023). A Review of Global Reporting Initiative (GRI) Research with Sustainability Reporting: 1999-2020 dataset. *Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review*, 26(2), 274–290. <https://doi.org/10.6018/rcsar.468261>
- GRI. (2022). *The GRI Standards Enabling transparency on organizational impacts*. Retrieved from www.globalreporting.org
- I Dewa Ayu Eka, P., Yudha Asteria Putri, P., & Gusti Ayu Ratih Permata Dewi, I. (2024). Analisis Sustainability Reporting Sebelum dan Sesudah Penerapan Standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.6185>
- Ilori, O., Lawal, C. I., Friday, S. C., Isibor, N. J., & Chukwuma- Eke, E. C. (2023). A Framework for Environmental, Social, and Governance (ESG) Auditing: Bridging Gaps in Global Reporting Standards. *International Journal of Social Science Exceptional Research*, 2(1), 231–248. <https://doi.org/10.54660/ijsser.2023.2.1.231-248>
- Lasswell, H. D. (1971). The Process and Effects of Mass Communication. *The Institute for Religious and Social Studies*, 84–99.
- Luque-Vílchez, M., Cordazzo, M., Rimmel, G., & Tilt, C. A. (2023). Key aspects of sustainability reporting quality and the future of GRI. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 14(4), 637–659. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-03-2023-0127>
- Mutia, K. D. (2025). Analisis Kecukupan POJK 51/2017 Sebagai Kerangka Regulasi PELaporan ESG Pada Emiten Sektor Keuangan Di Indonesia. *JURNAL AKTUAL AKUNTANSI BISNIS TERAPAN*. Retrieved from <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/akunbisnis/article/view/6519/109907>
- Mutiha, A. H. (2022). *The Quality of Sustainability Report Disclosure and Firm Value: Further Evidence from Indonesia*. 26. MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083026>
- Pristi, K. M., & Bandyono, A. (2024). Tren dan Pola Dalam Adopsi Standar Pelaporan Global Reporting Initiative (GRI) Oleh Perusahaan BUMN di Indonesia: Scoping Review Trends and Patterns in Adopting Global Reporting Initiative (GRI) Standards by State-Owned Enterprises in Indonesia: A Scoping Review. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(3), 305–318. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/iarj.v4i3.6110>
- Sebrina, N., Taqwa, S., Afriyenti, M., & Septiari, D. (2023). Analysis of sustainability reporting quality and corporate social responsibility on companies listed on the Indonesia stock exchange. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2157975>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research methods for business : a skill-building approach*. John Wiley & Sons Ltd. Retrieved from www.wileypluslearningspace.com
- Sumarwan, A. (2025). Evolusi ESG Di Dunia Dan Adopsinya Di Indonesia. *70 Tahun Sanata Dharma Menggali Makna Dan Membangun Harapan: Paradigma Keberlanjutan Dan Tantangan Perubahan Iklim*, 3, 2025. Retrieved from <https://e-conf.usd.ac.id/index.php/usdb>
- Wanta, D., & Noviantoro, R. (2022). The Effect Of Sustainability Report Disclosure On Company Performance (Empirical Study on Banking Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for The Period 2017-2020). *Accounting And Finance Research Letters Journal*, 2022(1), 8–17. Retrieved from <https://journal.privietlab.org/index.php/AFRL/article/view/193>